DINAMIKA SERTA PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Monalisa Rahman

Email: 2010128220010@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Perjalanan dan perkembangan demokrasi di Indonesia selama ini telah mengalami beberapa fase. Dimana dalam setiap periode terdapat dinamika dan problematika pencapaian demokrasi di Indonesia. Perubahan pola demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer sampai pada demokrasi di era reformasi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perjalanan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Adapun penulisan artikel ini menggunakan metode kepustakaan atau studi literatur yaitu dengan menelaah dan memahami isi buku-buku, dokumen, atau sumber ilmiah lainnya yang relevan dan mendukung untuk mendeskripsikan perjalanan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Artikel ini nantinya akan membahas perjalanan dan perkembangan serta dinamika demokrasi di Indonesia.

PENDAHULUAN

Demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang dinyatakan di Athena kuno pada abad ke-5 Sebelum Masehi. Negara-Kota Athena tersebut dipercaya sebagai awalan dari suatu sistem yang berkaitan dengan hukum demokrasi modern. Namun, maknanya dari itu berubah seiring dengan waktu dan pengertian kini sudah berubah secara lambat sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan komposisi demokrasi (Nihaya, 2016: 15).

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang sering kita dengar dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsepsi demokrasi menjadi suatu poin inti tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini wajar, karena demokrasi sekarang ini disebut sebagai indeks perkembangan politik suatu Negara (Nihaya, 2016: 15).

Demokrasi menduduki posisi penting dalam hubungan pembagian kekuasaan dalam suatu negara yang berdasarkan pada konsep trias politica dengan kekuasaan negara yang

didapat dari rakyat juga harus dipakai guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Nihaya, 2016: 15).

Konsep trias politica teramat penting untuk diperlibatkan saat fakta sejarah merekam kekuasaan pemerintah yang ternyata ketidakmampuan kekuasaan pemerintah dalam menjadikan masyarakat yang adil dan beradab, kadang sering juga kekuasaan mutlak pemerintah memunculkan penyimpangan atau terjadinya pelanggaran pada hak-hak rakyat. (Nihaya, 2016: 16).

Adapun juga perihal tentang kekuasaan yang berlebih di lembaga negara yang lain, seperti kekuasaan berlebih dari lembaga negara legislatif yang menetapkan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggotanya tanpa memperhatikan dan mempedulikan aspirasi rakyat (Nihaya, M, 2016: 16).

Jadi poinnya, tiap lembaga negara tidak hanya harus akuntabel, tapi juga harus ada mekanisme formal yang mewujudkan jiwa akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme itu dapat mampu membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut (Nihaya, M, 2016: 16).

Dalam penyelenggaraanya, demokrasi yang mejadikan rakyat dalam menentukan kebijakan negara, sering menyimpang saat peran negara yang terbentuk dalam pemerintahan melaksanakan prosedur yang berupaya memutuskan hakikat keinginan dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Prosedur itu dicapai melalui revolusi hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh rezim yang berkuasa. Gerakan hukum ataupun yuridis formal digunakan untuk mengubah dan membatasi ruang berlakunya sistem demokrasi (Irawan, 2016: 54).

Di Indonesia, demokrasi yang telah berjalan sudah menunjukkan bahwa tidak akan selamanya demokrasi dijalankan sesuai dengan hukum. otentiknya pada komposisi demokrasi di Indonesia sejak pada awal merdeka sampai dengan lahirnya Maklumat Wakil Presiden No. 10, demokrasi Pancasila, terpimpin, sampai akhirnya adanya era reformasi yang mengarah lebih banyaknya peranan pemerintahan negara dalam menyalurkan problematika terhadap demokrasi di Indonesia. Namun rakyat sebagai pemangku kedaulatan negara diharuskan untuk mengikuti keinginan dan kekuatan para elite politik yang berkuasa dalam melaksanakan demokrasi (Irawan, 2016: 55).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan atau studi literatur yaitu dengan menelaah dan memahami isi buku-buku, dokumen, atau sumber ilmiah lainnya yang relevan dan mendukung untuk mendeskripsikan perjalanan dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Dalam sejarah teori demokrasi, terbagi menjadi dua fakta historis yang penting (dalam Buku berjudul Ilmu Negara). Pertama, sebagian dan hampir semua orang di masa sekarang menganggap dirinya sebagai demokrat. Namun, yang disebutkan atau dikatakan dan dilakukan atau perbuat oleh rezim yang satu dengan yang lainnya sering berbeda. Kemudian yang kedua, banyaknya negara yang menganut ide demokrasi, lembaga politiknya menyatakan adanya kerawanan dan kerapuhan tatanan demokrasi (Purnamawati, 2020: 254).

Perkembangan demokrasi di Indonesia terdapat dua tahap yakni tahapan sebelum atau pra kemerdekaan dan tahapan sesudah atau pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia sesudah kemerdekaan mengalami ketidakstabilan dari masa kemerdekaan sampai saat sekarang ini, permasalahan inti yang dihadapi adalah bagaimana demokrasi itu membentuk dirinya dalam berbagai sisi negatif kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai tatanan kehidupan, pokok tatanan kehidupan demokratis secara empiris terhubung dengan permasalahan pada korelasi antar pemerintah dengan rakyat, atau sebaliknya korelasi antar rakyat dengan pemerintah dalam posisi seimbang dan saling melaksanakan pengawasan satu sama lain. (Purnamawati, 2020: 254-255).

Perkembangan dan perjalanan demokrasi di Indonesia berdasarkan waktu terbagi menjadi empat fase, yakni:

1. Demokrasi Parlementer Fase 1945-1959

Demokrasi di fase ini sering kita dengar dengan sebutan Demokrasi Parlementer. Demokrasi ini mulai berlaku pada satu bulan pasca kemerdekaan di proklamasikan dan juga mulai diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950, namun ternyata

sistem demokrasi ini kurang serasi bagi negara Indonesia, walaupun bisa berjalan dengan baik di beberapa negara lain (Purnamawati, 2020: 255).

Berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif meliputi Presiden serta para Menteri yang memiliki tanggung jawab politik dalam UUD 1950. Sebab fragmentasi partai politik tiap kabinet didasarkan pada situasi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata tidak berjalan dengan baik dan partai koalisi tidak segan untuk menarik kembali dukungannya sewaktu-waktu, hingga kabinet sering jatuh karena keruntuhan dalam koalisinya (Purnamawati, 2020: 255).

Biasanya kabinet dalam masa sebelum pemilu yang diadakan pada tahun 1955 tidak bisa bertahan lama dari kebanyakannya dalam delapan bulan, dan hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi politik oleh karena itu pemerintah tidak mendapat kesempatan menjalankan programnya (Purnamawati, 2020: 255-256).

Namun pada fase ini posisi parlemen yang sangat kuat dan pada akhirnya menguat juga posisi partai politik sebab itu suatu hal yang terhubung dengan kebijakan negara tidak bisa lepas dari perilaku kritis para anggota parlemen guna mendebatnya baik melalui forum parlemen ataupun secara mandiri (Purnamawati, 2020: 256).

2. Demokrasi Terpimpin Fase 1959-1965

Dalam sistem demokrasi pada fase ini, ciri menonjolnya adalah lebih banyaknya peran presiden dan terbatasnya peran partai politik. Dalam praktik pemerintahan, pada fase ini sudah banyak melakukan penyimpangan terhadap demokrasi. Dekrit Presiden 5 Juli bisa dianggap sebagai suatu upaya guna mencari solusi dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituante yang merupakan satu bentuk penyimpangan praktik demokrasi (Purnamawati, 2020: 256).

Demikian juga dalam UUD 1945 telah ditekankan bahwa bagi seorang presiden dapat bertahan sekurang-kurangnya lima tahun. Dalam ketetapan MPRS Nomor 3/1963 yang disebutkan bahwa Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah mematahkan atau membatalkan pembatasan waktu lima tahun (Purnamawati, 2020: 256).

Banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap praktik demokrasi, khususnya pada bidang eksekutif, seperti Presiden diberi wewenang untuk terlibat di dalam bidang yudikatif. Hal demikian bisa ditemukan dalam UU Nomor 19 Tahun 1964, legislatif, presiden bisa melakukan tindakan politik didasarkan pada peraturan tata tertib peraturan presiden No. 14/1960 mengenai anggota DPR yang tidak bisa mencapai fungsi (Purnamawati, 2020: 256).

Demokrasi terpimpin Soekarno tidaklah demokrasi yang sesungguhnya, tapi sebagai bentuk otoriter. Bentuk demokrasi terpimpin ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi terpimpin dari Soekarno berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI) (Purnamawati, 2020: 256).

3. Demokrasi Pancasila Fase 1965-1998

Fase pemerintahan ini muncul sesudah berakhirnya G30SPKI. Landasan formil fase ini ialah Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS. Semangat motivasi yang menjadi dasar munculnya atau lahirnya fase ini yakni keinginan guna memperbaiki atau mengembalikan dan memurnikan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni (Purnamawati, 2020: 257).

Upaya memperbaiki dan meluruskan dari penyimpangan terhadap UUD yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin, upaya yang telah dijalankan adalah mengadakan tindakan terkonsip. Ketetapan MPRS Nomor III Tahun 1963 yang menentukan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah digagalkan dan jabatan Presiden kembali menjadi selektif atau secara dipilih selama 5 tahun. Pada fase ini praktik demokrasi di Indonesia bertumpu pada nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, demokrasi pada masa sekarang ini disebut dengan Demokrasi Pancasila. Sebab dalam demokrasi pancasila melihat kedaulatan rakyat sebagai pokok dari demokrasi, sebab warga negara atau rakyat yang memiliki hak yang sama guna mengarahkan dan menetapkan haknya sendiri maunya seperti apa. Demikian pula keikutsertaan politik yang sama dengan semua rakyat. Untuk itu pemerintah seharusnya selalu memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam melaksanakan hak politik. Tetapi, Demokrasi Pancasila dalam rezim orde baru hanya sebagai hasil ekspresi dan ide

belum sampai pada tataran penerapan. Sebab dalam praktik pemerintahan, rezim inilah yang tidak menyediakan ruang bagi kehidupan berdemokrasi (Purnamawati, 2020: 257).

4. Demokrasi di Era Reformasi

Pelaksanaan demokrasi di era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu, Soeharto yang menjabat sebagai presiden sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia era reformasi memosisikan fondasi yang kuat bagi penyelenggaraan demokrasi Indonesia di masa selanjutnya. Ditemukan berbagai indeks penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, yaitu diberikannya kebebasan pers sebagai ruang terbuka untuk ikut terlibat dalam urusan kenegaraan dan berlakunya sistem multipartai, diberlakukannya ini nampak pada Pemilu tahun 1999. Di era ini rakyat berpeluang untuk bersatu dan berkumpul sesuai paham ideologi dan aspirasi politiknya (Purnamawati, 2020: 257-258).

Karakteristik menonjol dari era reformasi adalah demokrasi Pancasila. Warga negara bertugas mengawasi demokrasi agar bisa terpakainya dalam segala aspek kehidupan. Ciri demokrasi di era reformasi yaitu adanya Pemilu yang lebih demokratis, terjadinya pergantian atau perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Motif rekrutmen politik terbuka untuk hak dasar warga Negara dan rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik dijalankan secara terbuka. Hak-hak warga negara terlindungi dan terjamin, dan sebagian besar hak asasi rakyat dapat terjamin seperti kebebasan dalam menyatakan opini, kebebasan pers dan lain-lain (Purnamawati, 2020: 258).

Demokrasi di Indonesia berkembang selaras dengan pergejolakan politik yang terjadi pasca kemerdekaan. Perubahan pola demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, parlementer sampai pada era reformasi. Namun pada dasarnya, peran pemerintahan dalam melaksanakan demokrasi masih sangat lebih banyak, sebab dalam UUD 1945 serta perubahannya, masih terlihat kekuasaan pemerintahan lebih banyak dibanding kekuasaan lainnya (Irawan, 2016: 63).

SIMPULAN

Demokrasi di Indonesia berkembang selaras dengan pergejolakan politik yang terjadi pasca kemerdekaan. Perubahan pola demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, parlementer sampai pada era reformasi. Namun pada dasarnya, peran pemerintahan dalam melaksanakan demokrasi masih sangat lebih banyak, sebab dalam UUD 1945 serta perubahannya, masih terlihat kekuasaan pemerintahan lebih banyak dibanding kekuasaan lainnya (Irawan, 2016: 63).

Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi mengalami beberapa fase, hingga sekarang ini dikenal dengan era reformasi. Negara demokrasi, tentu membetulkan adanya partai politik sebagai sendi dari demokrasi atau penyelenggaraan kedaulatan rakyat itu. Hal demikian pada dasarnya pada penyelenggaraan demokrasi secara tidak langsung atau dilakukan melalui pemilu dalam rangka menjabat posisi kepemimpinan suatu negara yang adanya partai politik sebagai anggota pemilu. Partai politik pada dasarnya mempunyai posisi dan peran yang terpusat dan penting dalam tiap sistem demokrasi sebab melibatkan peran yang penting sebagai penyalur antara pemerintahan negara dengan rakyatnya.

REFERENSI

- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251-264.
- Nihaya, M. (2016). Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 10(2), 35-49.
- Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik Vol 3 No. 2, UNPAR, 2004.*, 3.
- Kurniawan, D. (2016). Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah yang Nyata dan yang Seharusnya. *MOZAIK: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1).
- Siregar, I. F. (2011). Dinamika Demokrasi di Indonesia Masa Orde Lama Studi Kasus antara Sukarno Vs Masyumi. *Paramita: Historical Studies Journal*, 21(1).
- Mardiani, M. Z. A. A. F. (2021). Memperkuat Identitas Nasional Melalui Model Pembelajaran Berpikir Historis (MPBH): Antara Nyata Atau Sebuah Asa?. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 6, No. 3).